

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Upaya untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan posisi tawar masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu secara ekonomi dan sosial dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat (Afriansyah, 2023). Pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan melalui pelibatan dalam pengambilan keputusan serta penguatan kapasitas. Melalui pelatihan, penciptaan lapangan kerja, dan pemanfaatan potensi lokal, pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan (Santoso dalam Setiadi & Pradana, 2022; Subarsono, 2017).

Sektor pariwisata diakui sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. *United Nations World Tourism Organization* mencatat bahwa pada tahun 2024 pariwisata menyumbang sekitar 10% PDB global dan mendukung jutaan lapangan kerja. Perkembangan paradigma pengembangan pariwisata kontemporer telah mengalami pergeseran yang signifikan, di mana fokus utama tidak lagi terbatas pada aspek kuantitatif kunjungan wisatawan saja, tetapi telah bergeser menuju prinsip keberlanjutan. Konsep pariwisata berkelanjutan pada dasarnya menekankan pentingnya mencapai keseimbangan optimal antara tiga dimensi fundamental, yaitu pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan komunitas lokal. Sebagai salah satu manifestasi operasional dari prinsip ini, pariwisata berbasis komunitas merupakan model pengelolaan destinasi pariwisata yang secara aktif melibatkan masyarakat lokal

dalam kapasitas mereka sebagai perencana, pengelola, dan penerima manfaat utama dari kegiatan pariwisata.

Di Indonesia, pendekatan ini dinilai mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta menggerakkan UMKM dan industri kreatif (Raharjo & Wirahayu, 2025). Sebagian besar desa memiliki sumber daya alam dan budaya yang dapat menarik wisatawan lokal. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 mengatur program pariwisata desa berkelanjutan yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini bertujuan menjadikan desa wisata sebagai penggerak ekonomi yang berbasis gotong royong dan berkelanjutan.

Di tingkat daerah, dinas pariwisata berperan mengidentifikasi potensi desa, memberikan pelatihan dan pendampingan, membantu pengembangan infrastruktur, serta melakukan promosi. Pariwisata berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi lokal (Fahlevi, 2025). Oleh karena itu, untuk membuat masyarakat mampu menjadi pelaku utama pembangunan, pengembangan pariwisata harus disertai dengan penguatan kapasitas mereka.

Kabupaten Semarang, yang berada di Jawa Tengah, memiliki banyak pilihan wisata alam dan budaya yang luar biasa untuk dieksplorasi, seperti Candi Gedong Songo dan Rawa Pening. Desa wisata didirikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata untuk meningkatkan daya saing dan memberdayakan masyarakat. Desa Kalongan telah berkembang menjadi tempat wisata.

Pengembangan Desa Wisata Kalongan telah dimulai sejak tahun 2018 melalui inisiatif masyarakat lokal yang kemudian dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Desa Wisata Kalongan dikenal dengan berbagai destinasi wisata yang saling berdekatan, seperti Pasar Sawahan yang dapat dikunjungi setiap Minggu Legi dan Pahing, Curug Gending Asmoro Kalongan Ungaran Timur, Curug Tedjo Asmoro di Desa Dampu, serta Tebing Patah Hati di Dusun Pringkurung. Pengelolaan destinasi wisata tersebut dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak, baik individu maupun kelompok.

Program pemberdayaan berbasis pariwisata melalui pengembangan Desa Wisata dilaksanakan sebagai respons terhadap potensi alam dan budaya Desa Kalongan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan infrastruktur pendukung berperan penting dalam mendukung pengembangan aset pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, penyelenggaraan festival dan kegiatan kebudayaan menjadi bagian dari upaya pemulihan dan promosi Desa Wisata Kalongan guna mendorong tren ekowisata berbasis pemberdayaan berkelanjutan. Inisiatif ini perlu dijalankan secara serius dengan melibatkan kerja sama antara masyarakat, pemerintah desa, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Secara empiris, kondisi ekonomi masyarakat Desa Kalongan sebelum dan sesudah pengembangan desa wisata menunjukkan perkembangan yang belum sepenuhnya meningkat secara signifikan. Pada tahun 2017, sebelum desa wisata dikembangkan secara intensif, terdapat sekitar 13 unit UMKM yang tersebar di delapan dusun seperti Dampu, Kajangan, dan Mendiro. Jenis usahanya meliputi

industri makanan (kerupuk, tahu, keripik, kulit lumpia), mebel, batako, keset, hingga pakaian.

Namun, pada tahun 2023 jumlah UMKM aktif tercatat sekitar 8 unit, termasuk usaha kerajinan bambu dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal seperti Jazuly Bamboo Art. Data ini menunjukkan bahwa secara jumlah, belum terjadi peningkatan unit usaha setelah program desa wisata berjalan. Dari sisi kelembagaan, jumlah anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga mengalami penurunan. Pada awalnya, ada 18 orang, tetapi sekarang hanya 14 orang. Penurunan ini menunjukkan betapa sulitnya bagi masyarakat untuk tetap terlibat dan terlibat dalam pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kalongan dilaksanakan secara sistematis melalui peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan pariwisata berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, BUMDes, dan Pokdarwis Lokajaya. Kegiatan pelatihan tidak hanya mengajarkan orang tentang cara merencanakan pariwisata yang berkelanjutan, tetapi juga memberi tahu orang tentang peran mereka sebagai tuan rumah yang baik bagi wisatawan (Agnesia, 2023). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi kreatif seperti pengelolaan pasar wisata, sanggar seni, dan pengembangan produk UMKM berbasis lokal terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi warga (Fathimah & Maryatin, 2024).

Pokdarwis Lokajaya menggunakan konsep 4M1P (Modal, Pemasaran, Produk, Manajemen, dan Mentor) dan One Village One Product (OVOP) sebagai cara untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Melalui strategi tersebut, pengelolaan Desa

Wisata tidak hanya menghasilkan inovasi dalam paket wisata berbasis alam dan budaya, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai ekologis dan pelestarian lingkungan melalui konsep *ecovillage* (Fathimah & Maryatin, 2024). Oleh karena itu, Desa Kalongan bukan hanya tempat wisata tetapi juga laboratorium sosial di mana masyarakat belajar mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dalam program Desa Wisata Kalongan mencerminkan sinergi antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan sebagai satu kesatuan yang harmonis.

Beberapa destinasi seperti Pasar Sawahan dan Tebing Al Fath menjadi contoh nyata partisipasi aktif masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata desa. Pemerintah Desa Kalongan bersama BUMDes turut mendukung pengembangan Desa Wisata melalui alokasi anggaran dari APBDes. Namun demikian, masih ada banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaan program pemberdayaan ini. Salah satunya adalah ketidaksetujuan sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya manfaat dari pembangunan sektor pariwisata. Kondisi ini menjadi salah satu kendala utama dalam proses pemberdayaan masyarakat, sehingga dibutuhkan ketelatenan dan strategi komunikasi yang efektif untuk melibatkan seluruh elemen warga. Di sisi lain, upaya digitalisasi promosi wisata mulai digalakkan oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan dukungan pemerintah desa melalui berbagai platform media sosial.

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang mendukung pembangunan Desa Wisata Kalongan dengan mendorong masyarakat lokal melalui program pengembangan desa wisata, festival, sosialisasi dan promosi, pertemuan mitra, dan

pelatihan atau workshop. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 merupakan pedoman teknis yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) 2020-2025 menetapkan dasar kebijakan pariwisata di Kabupaten Semarang. Tujuan utama kebijakan tersebut mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata untuk mendongkrak pendapatan daerah, penyebarluasan informasi wisata melalui strategi pemasaran yang efektif dan akuntabel, pengembangan sektor pariwisata yang dapat memperkuat kelembagaan dan tata kelola pariwisata secara berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

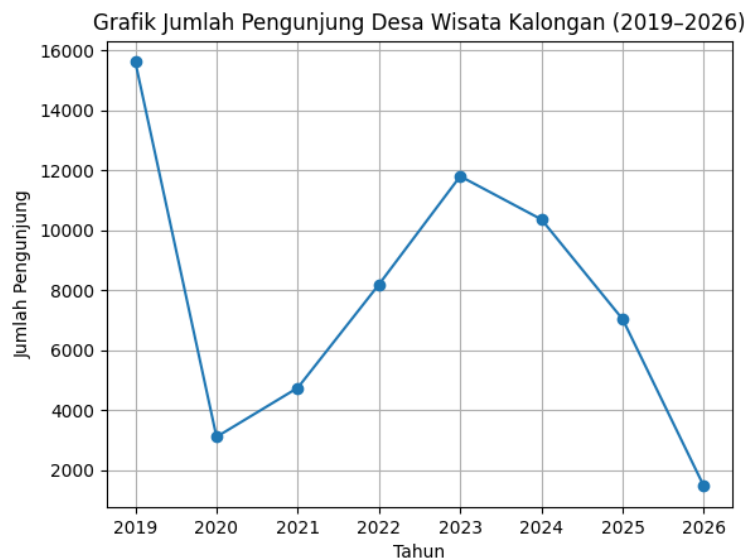
Dari sisi kesejahteraan, pengembangan desa wisata diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Secara nyata, keberadaan destinasi seperti Pasar Sawahan dan Curug Gendhing Asmoro telah menciptakan peluang ekonomi baru, seperti usaha kuliner, pengelolaan parkir, penjualan tiket, serta keterlibatan dalam kegiatan atau acara wisata. Hal ini menunjukkan adanya perluasan kesempatan kerja yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Namun, peningkatan pendapatan tersebut belum stabil karena masih bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan yang cenderung naik turun sesuai musim. Kegiatan ekonomi dari desa wisata saat ini lebih berperan sebagai tambahan penghasilan, belum menjadi sumber pendapatan utama yang berkelanjutan. Oleh

karena itu, aspek kesejahteraan seperti kestabilan pendapatan dan keberlanjutan usaha masih perlu diperkuat agar manfaat desa wisata dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat.

Untuk melihat kondisi fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan di Desa Kalongan, dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Pengunjung Desa Wisata Kalongan Tahun 2019-2026



Sumber: Data Sekretaris Desa Kalongan (2026)

Berdasarkan grafik jumlah kunjungan wisatawan Desa Kalongan tahun 2019-2026, terlihat bahwa perkembangan jumlah pengunjung mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan tercatat cukup tinggi yaitu sebanyak 15.624 pengunjung, yang menunjukkan adanya potensi awal yang cukup besar dalam pengembangan desa wisata. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis menjadi 3.115 pengunjung yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak langsung terhadap sektor pariwisata secara luas.

Memasuki tahun 2021 hingga 2023, jumlah kunjungan mulai menunjukkan tren peningkatan secara bertahap, dari 4.752 pengunjung pada tahun 2021 hingga mencapai 11.810 pengunjung pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya upaya pemulihan aktivitas wisata serta mulai meningkatnya minat kunjungan ke Desa Kalongan. Namun demikian, tren peningkatan tersebut tidak berlangsung secara konsisten. Pada tahun 2024 jumlah kunjungan kembali mengalami penurunan menjadi 10.370 pengunjung, dan terus menurun hingga 7.040 pengunjung pada tahun 2025.

Penurunan yang cukup signifikan kembali terlihat pada tahun 2026 dengan jumlah kunjungan sebesar 1.472 pengunjung, yang dipengaruhi oleh adanya kegiatan pemugaran atau renovasi fasilitas wisata yang sedang berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Desa Kalongan masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi pandemi, perbaikan infrastruktur, serta keberlanjutan kegiatan wisata yang diselenggarakan.

Secara keseluruhan, fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata di Desa Kalongan belum sepenuhnya stabil dan berkelanjutan. Kunjungan wisatawan masih bersifat situasional dan belum menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi desa wisata yang dimiliki belum didukung oleh sistem pengelolaan yang terstruktur serta strategi pengembangan yang berkelanjutan.

Kondisi fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan tersebut tidak hanya berdampak pada keberlanjutan kegiatan pariwisata, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat desa. Ketika

jumlah kunjungan meningkat, peluang usaha dan pendapatan masyarakat cenderung meningkat, namun ketika terjadi penurunan, aktivitas ekonomi juga ikut melemah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata tidak hanya bergantung pada potensi yang dimiliki, tetapi juga pada kemampuan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Untuk mengubah sebuah desa menjadi desa wisata, diperlukan upaya untuk mengeksplorasi dan menemukan potensi desa yang menarik bagi wisatawan, baik dari segi alam, budaya, maupun karya manusia. Dengan mendorong masyarakat untuk mengembangkan desa wisata, beberapa komunitas telah mulai merasakan manfaat ekonomi, seperti peningkatan pendapatan dan peluang usaha baru. Namun demikian, manfaat tersebut belum sepenuhnya merata dan masih dipengaruhi oleh fluktuasi jumlah wisatawan.

Selain permasalahan tersebut, Desa Kalongan juga memiliki potensi khas yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam mendukung pengembangan desa wisata. Desa Kalongan juga memiliki potensi khas berupa keberadaan komunitas kreatif lokal, seperti komunitas film, yang belum banyak dikaji dalam konteks pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Keberadaan komunitas ini menjadi nilai tambah yang berpotensi dikembangkan sebagai bagian dari daya tarik wisata sekaligus sebagai media pemberdayaan masyarakat. Namun, hingga saat ini potensi tersebut belum terintegrasi secara optimal dalam pengelolaan desa wisata.

Meskipun demikian, proses pemberdayaan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada berbagai tantangan multidimensional.

Pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata Kalongan masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia, kelembagaan, ekonomi, dan sosial budaya. Penelitian Fathimah Tsabitah Al-Khairiyah dan Maryatin (2024) menunjukkan bahwa salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan Desa Wisata Kalongan adalah lemahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya di lingkungan Pokdarwis yang sering mengalami pergantian anggota setiap periode sehingga menghambat keberlanjutan program. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, minimnya pemahaman mengenai potensi daerah dan perencanaan pariwisata berkelanjutan, keterbatasan modal pembangunan, serta kurangnya promosi wisata juga menjadi hambatan dalam pengembangan Desa Wisata Kalongan.

Agnesia Putri Kurnianingtyas (2023) menyatakan bahwa masyarakat Desa Kalongan tidak memahami konsep pariwisata berkelanjutan dan perencanaan pariwisata berbasis masyarakat. Hal ini mengakibatkan warga tidak mampu mengelola potensi pariwisata secara mandiri dan berkelanjutan dengan baik. Walaupun Desa Kalongan memiliki berbagai potensi wisata seperti Pasar Sawahan, Curug Gending Asmoro, dan Khayangan Tebing Al Fath, kapasitas masyarakat yang masih terbatas menyebabkan potensi tersebut belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Lebih lanjut, penelitian oleh Bagas Firzi Firmansyah dan Fakhruddin (2025) mengungkap bahwa implementasi pengelolaan Desa Wisata Kalongan berbasis *Community-Based Tourism* (CBT) masih menghadapi kendala struktural, khususnya dalam aspek perencanaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Walaupun konsep CBT telah diterapkan melalui pelibatan masyarakat, belum semua warga memiliki kesadaran dan keterampilan untuk berpartisipasi aktif. Selain itu, lemahnya komunikasi dan koordinasi antara Pokdarwis, BUMDes, dan pemerintah desa turut menghambat efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan.

Berdasarkan pada permasalahan pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan yang telah dijelaskan, maka pada kesempatan ini, para peneliti ingin mempelajari bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan di Desa Kalongan. Mereka ingin melihat apakah ada masalah saat melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Kalongan. Menurut Suparjan dan Hempri S. (2003:44), proses pemberdayaan masyarakat memerlukan tahapan yang sistematis, terarah, dan terencana. Tahapan tersebut meliputi peningkatan kesadaran kritis masyarakat terhadap posisinya dalam struktur sosial dan politik, kemampuan dalam mengemukakan argumentasi terhadap berbagai bentuk eksploitasi, pengembangan kapasitas masyarakat, serta penguatan aspek sosial dan budaya. Menurut Ambar Teguh S. (2004:83), pemberdayaan masyarakat adalah proses belajar yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian melalui berbagai tahapan pemberdayaan. Berdasarkan dua pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat adalah tahapan yang paling penting untuk mencapai tujuan pemberdayaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah menjelaskan kondisi nyata Desa Kalongan, potensi yang dimiliki, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan program desa wisata, diperlukan rumusan pertanyaan penelitian yang jelas dan

terarah. Rumusan pertanyaan ini penting untuk membimbing proses analisis agar dilakukan secara sistematis dan fokus. Karena pertanyaan penelitian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif umum, tetapi juga secara khusus mempelajari aspek pemberdayaan masyarakat dalam implementasi program desa wisata. Fokus penelitian studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang?

Pertanyaan penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan, mulai dari tahap penyadaran, peningkatan kapasitas, hingga bentuk pendampingan yang diberikan oleh pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, dan Dinas Pariwisata. Penelitian ini juga mengkaji peran masing-masing pihak, pola koordinasi antar pemangku kepentingan, serta berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program Desa Wisata Kalongan.

Dengan mengingat hal-hal yang disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang”**.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Kalongan, terutama anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Lokajaya, tidak memiliki kemampuan dan keahlian manajemen yang diperlukan untuk mengelola potensi wisata yang ada. Minimnya pelatihan, pendampingan, dan pembinaan pariwisata berkelanjutan menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam merancang program wisata yang menarik dan berdaya saing.
2. Tidak semua warga terlibat aktif dalam kegiatan pengembangan wisata. Partisipasi hanya didominasi oleh kelompok tertentu seperti Pokdarwis dan BUMDes, sedangkan sebagian besar masyarakat masih bersifat pasif. Rendahnya kesadaran wisata (*tourism awareness*) dan kurangnya rasa memiliki terhadap desa wisata menjadi kendala dalam mendorong keterlibatan masyarakat secara menyeluruh.
3. Upaya promosi destinasi wisata Kalongan masih terbatas dan belum dilakukan secara profesional dan terencana. Minimnya pemanfaatan teknologi *digital marketing* menyebabkan potensi wisata di Desa Kalongan belum dikenal luas oleh wisatawan domestik maupun luar daerah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana faktor-faktor yang terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Meneliti program Desa Wisata untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.
2. Untuk menyelidiki bagaimana program Desa Wisata mendorong pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Studi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para peneliti tentang program desa wisata untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pengembangan desa wisata di lokasi tersebut.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai studi desa wisata di Desa Kalongan, khususnya mengenai aspek sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan menjelaskan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam program pengembangan desa wisata yang dilaksanakan oleh Kantor Pemerintahan Kabupaten Semarang.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan tentang konsep dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata. Hasilnya akan menjadi model untuk pengembangan desa wisata di tempat lain.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan para peneliti lain tentang ruang lingkup penelitian pengembangan kawasan pariwisata. Selain itu, penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi untuk peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama. Oleh karena itu, temuan penelitian ini akan mendukung penelitian terkait masalah ini.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Title | Background | Method | Result and Discussion | Conclusion | Link |
|----|--|--|--|---|---|--|
| 1. | <p>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Di Kelurahan Kandri Kecamatan GunungPati Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Penulis: Aldivon Atok; Pratidina Santoso</p> <p>Tahun Terbit: 2022</p> | <p>Penelitian ini berawal dari tingginya angka kemiskinan yang ada di Kota Semarang. Solusi untuk mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah dengan mewujudkan pemanfaatan potensi pariwisata yang ada di Kota Semarang. Salah satunya</p> | <p>Desain penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.</p> | <p>Hasil penelitian terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati sudah dilakukan dengan baik. Sudah terdapat upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata dengan menghadirkan</p> | <p>Penelitian ini memberi saran kepada Pemerintah Kelurahan Kandri yaitu dengan mengadakan pelatihan pemanfaatan teknologi serta manajemen untuk promosi Desa Wisata Kandri melalui sosial media. Relevansinya dengan penelitian yang akan dibuat ialah untuk melihat pentingnya pemanfaatan teknologi serta manajemen dalam mempromosikan Program Desa Wisata.</p> | <p>https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/2930</p> |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>adalah melalui Program Desa Wisata. Keberhasilan Program Desa Wisata dapat dilihat dari perubahan partisipasi sosial masyarakat. Di lain sisi, gap penelitian sebelumnya dapat dilihat dari masih sedikitnya penelitian yang berfokus pada perubahan partisipasi sosial masyarakat dalam pelaksanaan Program Desa Wisata.</p> | | <p>sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta sudah terlaksana pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Kandri. Namun, ada kekurangan di mana di bagian pendanaan serta promosi.</p> | | |
| 2. | <p>Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan</p> | <p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami tahap</p> | <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pemberdayaan masyarakat di Desa</p> | <p>Penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,</p> | <p>https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpmp/article/view/45165/31410</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>Pariwisata Di Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang</p> <p>Penulis: Adela Sanmutiane; Retna Hanani; R Slamet Santoso</p> <p>Tahun terbit: 2024</p> | <p>pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan di Desa Wisata Wonolopo, yang dinilai masih terbelakang jika dibandingkan dengan desa wisata lainnya di Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan pemberdayaan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata, dengan harapan akan memberikan rekomendasi untuk</p> | <p>dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan informan yang relevan seperti pejabat pemerintah, ketua kelompok sadar wisata, dan masyarakat lokal, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini mengidentifikasi dan merinci faktor-faktor penghambat yang konkret dalam konteks Desa Wonolopo, seperti kelembagaan, sumber daya manusia, dan</p> | <p>Wonolopo belum optimal. Penyeragaman masyarakat telah dilakukan, namun masih terdapat perbedaan respon di antara anggota masyarakat. Partisipasi masyarakat yang rendah menjadi hambatan utama dalam pengembangan desa wisata. Faktor-faktor penghambat meliputi sumber daya manusia yang tidak memadai, kelembagaan yang lemah, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta persaingan pasar yang ketat. Penelitian ini juga menekankan</p> | <p>melibatkan mereka dalam perencanaan dan pengelolaan desa wisata, dan memperbaiki infrastruktur. Selain itu, pengembangan program promosi menggunakan teknologi digital juga direkomendasikan untuk menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini menyarankan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|---|
| | | meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pemberdayaan. Gap pada penelitian sebelumnya cenderung tidak membahas tahapan dalam pemberdayaan masyarakat secara detail dan hanya berfokus pada salah satu tahapan saja. | persaingan pasar. Banyak penelitian sebelumnya mungkin tidak memberikan analisis sedalam ini atau tidak mempertimbangkan faktor-faktor spesifik yang relevan untuk desa tertentu. | pentingnya evaluasi berkelanjutan dan komunikasi antara pihak terkait untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat | | |
| 3. | Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan | Penelitian ini bermula dari upaya pengentasan kemiskinan mulai dari sektor Pemerintahan hingga Lembaga Swadaya Masyarakat, fokus utamanya yaitu | Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan memilih narasumber penelitian yaitu | Hasil penelitian ini menjelaskan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata Desa Geni Langit dengan <i>Context, Input, Proses, Output, Outcome</i> . Dampak | Penelitian menyarankan Perubahan pada arah yang maju sebaiknya dipertahankan dan terus berlanjut karena secara individu setiap warga sudah bisa mandiri dan berpikir maju untuk mengubah | https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publikasi/article/view/46724 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|
| | <p>Penulis: Muhammad Bagus Setiadi</p> <p>Tahun Terbit: 2022</p> | <p>demis meneken angka kemiskinan Dan menyejahterakan masyarakat. Pada mulanya Desa Wisata Genilangit merupakan lahan perhutani yang tidak terurus dan hanya dimanfaatkan sebagai bumi perkemahan dan hutan pinus. Dalam proses pembentukannya desa wisata ini mengalami berbagai permasalahan, salah satunya adalah perubahan nama Taman Wisata Bedengan menjadi Taman Wisata Genilangit.</p> | <p>masyarakat Desa Genilangit. Penelitian ini berdasarkan pengumpulan data primer yang dilakukan peneliti di lapangan, serta memperoleh data sekunder yang bersumber dari jurnal, artikel maupun situs pada internet. Teknik analisa data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.</p> | <p>pemberdayaan yang dirasakan warga secara sosial ialah menjadi sangat terbuka satu sama lain. Interaksi antara individu satu dengan lainnya berjalan dengan baik. Selain itu juga intensitas pertemuan yang padat juga membuat mereka bisa membicarakan segala hal dalam kehidupan. Permasalahan-permasalahan warga juga terkendali dengan seringnya mereka berinteraksi satu sama lain. Dalam waktu tiga tahun terakhir peningkatan ekonomi</p> | <p>kehidupannya sendiri ke arah yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat Desa Genilangit kedepannya diharapkan agar dapat berhasil dalam program Desa Wisata dan dapat menaikkan taraf hidup dan menyejahterakan masyarakatnya. Relevansinya dengan penelitian yang akan dibuat ialah untuk mengetahui bahwa keberhasilan Program Desa Wisata menyimpan sejuta manfaat bagi masyarakat sekitar.</p> | |
|--|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|
| | | <p>Perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa merupakan target pembangunan yang utama, kemampuan untuk berkembang secara mandiri akan muncul jika partisipasi masyarakat mulai digalakkan dalam membangun desa. Gap pada penelitian sebelumnya terlihat dari masih kurangnya penelitian yang berfokus pada perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa dan hanya berfokus pada</p> | | <p>desa Genilangit mengalami kenaikan yang signifikan. Ribuan wisatawan yang hadir menambah daftar pencapaian warga dan meningkatkan stabilitas ekonomi desa. Seluruh kegiatan warga mampu dikemas hingga menghasilkan profit tersendiri untuk warga.</p> | | |
|--|--|---|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|--|
| | | aspek ekonominya saja. | | | | |
| 4. | <p>Pemberdayaan Masyarakat Melalui <i>Community Based Tourism</i> Pada Program Desa Wisata</p> <p>Penulis: Herlina Suksmawati</p> <p>Tahun Terbit: 2022</p> | <p>Penelitian ini menjelaskan bahwa Pariwisata berbasis masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan. Pengembangan desa wisata semestinya direncanakan dengan hati-hati dengan</p> | <p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data pengurus Pokdarwis Jabung dan masyarakat Desa Jabung Panekan Magetan. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan Pemberdayaan masyarakat oleh Pokdarwis Jabung diterapkan melalui pengelolaan program Desa Wisata Jabung. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang tersebut adalah dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, diskusi, kompetisi, percontohan dan perintisan.</p> | <p>Penelitian ini menyarankan dalam upaya pemberdayaan masyarakat sebaiknya pengurus Pokdarwis lebih berkoordinasi dengan masyarakat agar kegiatan yang dilakukan dapat efisien dan tepat sasaran. Sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Relevansinya dengan penelitian yang akan dibuat ialah untuk mengetahui bahwa upaya pemberdayaan masyarakat akan terlaksana dengan efisien dan tepat sasaran apabila masyarakat</p> | <p>http://ejournal.upnja.tim.ac.id/index.php/jbi/article/download/3070/1969</p> |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|---|
| | | perencanaan yang matang supaya dampak yang timbul dapat terkontrol. Gap dengan penelitian sebelumnya terlihat dari masih kurangnya penelitian yang berfokus untuk melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam pemberdayaan masyarakat sehingga pelaksanaannya menjadi tidak efisien dan tidak tepat sasaran. | | | diikutsertakan dalam proses koordinasinya. | |
| 5. | <i>Community Empowerment in the Context of Sustainable Tourism</i> | Penelitian ini berfokus pada pentingnya pengembangan pariwisata yang | Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk | Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengembangan pariwisata di Desa | Penelitian ini menekankan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa | https://www.researchgate.net/profile/Syahrul-Akbar/publication/359031156_Communit |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
| | <p><i>Development in Surodadi Village</i></p> <p>Penulis: Syahrul Akbar; Evi Noviyanti; Ute Lies Siti Khadijah; Reiza D. Deinaputra</p> <p>Tahun Terbit: 2021</p> | <p>berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, terutama di desa-desa yang kurang berkembang seperti Desa Surodadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Surodadi melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan</p> | <p>menganalisis kondisi faktual, potensi pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata di Desa Surodadi tanpa melakukan intervensi. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, termasuk observasi lapangan, studi literatur, dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan menggunakan model analisis data interaktif, yang mencakup tiga tahap: kondensasi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, potensi pariwisata dan</p> | <p>Surodadi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan objek wisata sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata sangat penting. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, dan</p> | <p>Surodadi dapat dilakukan melalui tiga pilar utama, yakni aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Penelitian ini merekomendasikan empat langkah penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat: menilai kebutuhan dan kesiapan masyarakat, melatih dan mempersiapkan masyarakat, mengidentifikasi dan menentukan kepemimpinan lokal, dan mengembangkan organisasi masyarakat. Relevansinya dengan penelitian yang hendak dibuat ialah bahwa mengeksplorasi bagaimana program desa wisata dapat meningkatkan</p> | <p>ity Empowerment in the Context of Sustainable Tourism Development in Surodadi Village/links/6243b9c757084c718b75cfb8/Community-Empowerment-in-the-Context-of-Sustainable-Tourism-Development-in-Surodadi-Village.pdf</p> |
|--|---|---|---|--|---|---|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|
| | | partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata. | pemberdayaan masyarakat di Desa Surodadi dianalisis menggunakan pendekatan lima dimensi dalam pariwisata berbasis masyarakat, yaitu dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. | evaluasi pengembangan pariwisata. Keterlibatan ini menciptakan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap daerah mereka. Meskipun ada potensi besar untuk pengembangan pariwisata di Surodadi, tantangan seperti kurangnya infrastruktur dan pengembangan yang belum optimal masih perlu diatasi. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan keterlibatan masyarakat, pariwisata dapat menjadi alat yang efektif untuk pemberdayaan | pendapatan masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan BUMDes sebagai sarana pengelolaan wisata. Selain itu, peneliti dapat mengadopsi pendekatan yang sama dalam melestarikan lingkungan dan budaya lokal, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya. | |
|--|--|--|---|--|---|--|

| | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|
| | | | | masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. | | |
| 6. | <p><i>Local Community Empowerment for Sustainable Tourism Development: A Case Study of Edelweiss Park Wonokitri Village</i></p> <p>Penulis: Andini Risfandini; Irwan Yulianto; Wan-Hafiz Wan-Zainal-Shukri</p> <p>Tahun Terbit: 2023</p> | <p>Penelitian ini muncul dari kesadaran bahwa meskipun ada banyak penelitian sebelumnya tentang pariwisata berkelanjutan, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman tentang implementasi praktis dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai keberlanjutan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan</p> | <p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Penelitian dilakukan di Edelweiss Park, Wonokitri Village, di mana para pemangku kepentingan dari taman dan pengunjung diwawancarai. Sebanyak enam informan dipilih berdasarkan pengetahuan mereka tentang</p> | <p>Penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal di Wonokitri Village telah berhasil dalam menciptakan taman Edelweiss yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat konservasi tetapi juga sebagai destinasi wisata. Masyarakat lokal dilibatkan dalam pelatihan dan pengelolaan taman, yang membantu mereka memahami pentingnya konservasi Edelweiss dan meningkatkan keterampilan</p> | <p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Melalui pelatihan, keterlibatan dalam pengelolaan taman, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi dari pariwisata, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian budaya dan</p> | <p>https://www.iieta.org/journals/ijsdp/paper/10.18280/ijsdp.181127</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>wawasan dan strategi yang efektif untuk mengelola desa wisata, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mempromosikan praktik pariwisata berkelanjutan di Indonesia</p> | <p>praktik pariwisata berkelanjutan di desa Wonokitri. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang berarti informan dipilih karena mereka mewakili pemangku kepentingan kunci yang terlibat dalam praktik pariwisata berkelanjutan yang berfokus pada pemberdayaan lokal. Informan tersebut termasuk perwakilan kelompok petani, operator tur, karyawan taman Edelweiss, penduduk desa, dan wisatawan.</p> | <p>mereka dalam pengelolaan pariwisata. Penelitian menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga manfaat sosial melalui pelestarian budaya dan lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal di Edelweiss Park menunjukkan bagaimana pemberdayaan komunitas dapat menghasilkan praktik pariwisata yang memberikan manfaat komprehensif bagi</p> | <p>lingkungan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam pengembangan pariwisata, di mana masyarakat lokal menjadi aktor utama dalam proses tersebut. Relevansinya dengan penelitian yang akan dibuat ialah fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal di Desa Kalongan dapat menjadi kunci untuk menciptakan program desa wisata yang sukses. Peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan program wisata dapat meningkatkan rasa</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|---|--|
| | | | | lingkungan dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. | memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan. | |
| 7. | <p><i>The community empowerment program based on local potential through tourism village</i></p> <p>Penulis: Kurniawan M.U.; Cahyono A.E.</p> <p>Tahun Terbit: 2020</p> | <p>Penelitian ini berfokus pada pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata. Dalam konteks globalisasi dan urbanisasi yang cepat, banyak komunitas lokal menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas budaya dan sumber daya alam mereka. Penelitian ini juga menyoroti bahwa pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya</p> | <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini difokuskan pada konsep-konsep yang menjelaskan masalah atau fenomena yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari beberapa literatur yang meliputi buku-buku, peraturan pemerintah, dan jurnal penelitian sejenis mengenai</p> | <p>Penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan desa wisata meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap proyek tersebut. Identifikasi potensi lokal, seperti budaya, kerajinan tangan, dan sumber daya alam, terbukti efektif dalam menarik wisatawan. Masyarakat mampu mengembangkan produk wisata yang</p> | <p>Penelitian ini menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, melestarikan budaya lokal, dan menjaga lingkungan. Program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan desa wisata dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk</p> | <p>https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/485/1/012089</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| | | <p>memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dengan melestarikan tradisi dan lingkungan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan desa wisata yang sukses dan berkelanjutan, yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi komunitas tersebut.</p> | <p>pemberdayaan masyarakat desa berbasis keunggulan lokal.</p> | <p>unik dan menarik berdasarkan kekayaan lokal mereka. Terdapat peningkatan pendapatan bagi masyarakat lokal melalui kegiatan pariwisata, yang membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Beberapa desa melaporkan peningkatan signifikan dalam jumlah pengunjung dan pendapatan dari sektor pariwisata.</p> | <p>pemerintah, LSM, dan sektor swasta, diakui sebagai kunci keberhasilan dalam implementasi program ini. Relevansinya dengan penelitian yang akan dibuat ialah pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap proyek wisata. Peneliti dapat menganalisis dampak ekonomi dari program desa wisata di Desa Kalongan, termasuk peningkatan pendapatan masyarakat dan</p> | |
|--|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|--|
| | | | | | pengurangan kemiskinan. | |
| 8. | <p><i>Learning From Goa Pindul: Community Empowerment through Sustainable Tourism Villages in Indonesia</i></p> <p>Penulis: Yudan Hermawan, Sujarwo; Yoyon Suryono</p> <p>Tahun Terbit: 2023</p> | <p>Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata berkelanjutan di Goa Pindul, Indonesia. Meskipun ada tantangan, banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pengelolaan lingkungan berbasis pariwisata. Penelitian ini menyoroti</p> | <p>Peneliti menggunakan <i>pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis</i> (IPA). Metode ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan pengalaman subjektif individu dalam konteks fenomena sosial tertentu. Proses penelitian melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan sembilan peserta dari komunitas desa wisata Goa Pindul. Melalui wawancara ini, peneliti berusaha untuk</p> | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan proses peningkatan kesadaran melalui sosialisasi dan layanan masyarakat. Pelatihan manajemen pariwisata yang berbasis kebutuhan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk pembentukan kelompok kesadaran pariwisata (POKDARWIS) yang bertugas</p> | <p>Penelitian ini menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Proses ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengembangan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Masyarakat mengalami peningkatan kesadaran akan potensi desa mereka melalui sosialisasi dan pendidikan, yang membantu mereka memahami pentingnya</p> | <p>https://www.proquest.com/scholarly-journals/learning-go-a-pindul-community-empowerment-through/docview/2816154815/se-2?accountid=49069</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|
| | | <p>pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, di mana masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan desa wisata.</p> | <p>menggali pengalaman dan interpretasi peserta terkait dengan pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata.</p> | <p>mengelola potensi desa dan mengevaluasi perkembangan. Masyarakat Desa Bejiharjo aktif terlibat dalam setiap tahap pengembangan desa wisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pemberdayaan berbasis pariwisata berhasil menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Banyak warga yang sebelumnya tidak bekerja kini terlibat dalam pengelolaan desa wisata, seperti menjadi pemandu wisata dan pengusaha kuliner.</p> | <p>menjaga lingkungan dan budaya lokal. Relevansinya dengan penelitian yang hendak dibuat ialah peneliti dapat mengadopsi pendekatan pemberdayaan yang sama, di mana masyarakat desa Kalongan dilibatkan secara aktif dalam pengembangan program desa wisata. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalongan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam manajemen pariwisata, pemasaran,</p> | |
|--|--|--|---|---|---|--|

| | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | dan pelayanan kepada wisatawan. | |
| 9. | <p><i>Community Empowerment through the Development of the Cisaat Tourism Village, Subang Regency</i></p> <p>Penulis: Willya Achmad; Hsiu. M Chuang; Uga Pratama Gunawan; Dini Nadila; Ikhsan Maulana</p> <p>Tahun Terbit: 2023</p> | <p>Penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami bagaimana masyarakat setempat dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, serta bagaimana hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Desa wisata menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan sumber daya lokal dan menarik wisatawan, yang pada gilirannya</p> | <p>Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari informan yang meliputi kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Subang, pengelola desa wisata, masyarakat lokal, dan pengujung. Sementara itu, sumber data sekunder terdiri dari dokumen dan monograf yang relevan. Untuk meningkatkan keakuratan dan</p> | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal semakin terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap proyek pariwisata, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas. Dengan adanya pengembangan desa wisata, masyarakat mengalami peningkatan pendapatan melalui berbagai kegiatan ekonomi, seperti penyediaan</p> | <p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Program pemberdayaan ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata, memperkuat identitas budaya lokal, dan mendorong pelestarian lingkungan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan</p> | <p>https://ilomata.org/index.php/ijss/article/view/642</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|
| | | <p>dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Penelitian ini juga mempertimbangkan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata, termasuk aspek manajemen, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan</p> | <p>validitas data yang dikumpulkan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi.</p> | <p>akomodasi, makanan, dan jasa pemanduan wisata. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti kurangnya pelatihan dan keterampilan di kalangan masyarakat untuk mengelola pariwisata secara profesional, serta kebutuhan akan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk pengembangan infrastruktur.</p> | <p>pendidikan, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan model pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Relevansinya dengan penelitian yang hendak dibuat ialah bahwa model yang dapat diadaptasi untuk, terutama dalam hal strategi pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan desa wisata.</p> | |
|--|--|--|---|---|---|--|

| | | | | | | |
|------------|--|---|---|---|--|--|
| <p>10.</p> | <p><i>Community Empowerment Process Through Tourism Village Program</i></p> <p>Penulis: Hana Rahmawati Aryani; Tri Suminar</p> <p>Tahun Terbit: 2023</p> | <p>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada pertanian dan pekerjaan proyek. Dengan potensi pariwisata yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana program desa wisata dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja.</p> | <p>Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui teknik observasi dan wawancara, yang bertujuan untuk mengeksplorasi informasi mengenai identitas lokasi penelitian, proses pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor pendukung dan</p> | <p>Penelitian menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu kesadaran, transformasi, dan pengayaan. Pada tahap kesadaran, masyarakat diberikan sosialisasi oleh pemerintah desa untuk memahami konsep desa wisata. Metode <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam diskusi dan meningkatkan pemahaman mereka tentang potensi lokal. Program desa wisata diharapkan</p> | <p>Penelitian ini menekankan bahwa program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi pariwisata lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan ekonomi. Proses pemberdayaan yang dilakukan melalui tiga tahap kesadaran, transformasi, dan pengayaan menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan dari pemerintah sangat penting untuk keberhasilan program. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor</p> | <p>https://www.edurasi.a.org/index.php/IJSIS/article/view/53</p> |
|------------|--|---|---|---|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|---|--|--|
| | | | <p>penghambat yang ada.</p> | <p>dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada, masyarakat dapat mengembangkan usaha lokal yang berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat keberhasilan program tersebut.</p> | <p>pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pemberdayaan, yang dapat menjadi acuan untuk perbaikan di masa mendatang. Relevansinya dengan penelitian yang hendak dibuat ialah bahwa peneliti dapat menggunakan model tiga tahap pemberdayaan (kesadaran, transformasi, dan pengayaan) yang ditemukan dalam penelitian Cempaka sebagai kerangka kerja untuk menganalisis proses pemberdayaan di Desa Wisata.</p> | |
|--|--|--|-----------------------------|---|--|--|

Program Desa Wisata Kandri di Kota Semarang, Jawa Tengah, merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui pariwisata, menurut studi pertama. Selain itu, studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Hasil studi menunjukkan bahwa pemerintah telah meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan fasilitas dan pelatihan sumber daya manusia. Namun, ada kendala dalam pendanaan dan promosi, sehingga disarankan agar desa wisata lebih memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk pemasaran.

Di Desa Wisata Wonolopo, Kota Semarang, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata menjadi topik studi kedua. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa tahap pemberdayaan masyarakat di Desa Wonolopo belum optimal. Penyadaran masyarakat telah dilakukan, namun masih terdapat perbedaan respon di antara anggota masyarakat. Partisipasi masyarakat yang rendah menjadi hambatan utama dalam pengembangan desa wisata. Faktor-faktor penghambat meliputi sumber daya manusia yang tidak memadai, kelembagaan yang lemah, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta persaingan pasar yang ketat.

Penelitian ketiga membahas pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Genilangit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Awalnya, desa ini

adalah sebuah perkemahan dan hutan pinus yang tidak terawat. Dengan inisiatif masyarakat setempat, desa ini kemudian dikembangkan menjadi desa wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Tantangan utama dalam pengembangan desa wisata ini adalah minimnya dukungan awal dari masyarakat serta masalah regulasi dan pendanaan. Namun, seiring berjalannya waktu, desa ini berhasil berkembang dengan konsep wisata alam yang menarik.

Penelitian keempat membahas konsep *Community Based Tourism* (CBT) dalam program desa wisata, dengan fokus pada partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan wisata. Penelitian ini menyoroti Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, dan bagaimana Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) berperan dalam pengembangan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dapat meningkatkan ekonomi lokal. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya SDM yang terampil serta keterbatasan dalam promosi dan pemasaran.

Penelitian kelima membahas pemberdayaan masyarakat dalam konteks pariwisata berkelanjutan di Desa Surodadi, Kabupaten Demak. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dan data dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata di Desa Surodadi masih menghadapi banyak tantangan, seperti erosi pantai, tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat, dan kurangnya infrastruktur. Namun,

inisiatif rehabilitasi lingkungan dan penguatan regulasi desa telah menjadi langkah positif dalam pembangunan desa wisata berbasis masyarakat.

Penelitian keenam meneliti pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Taman Edelweiss di Desa Wonokitri, Pasuruan, Jawa Timur. Penelitian ini menyoroti bagaimana desa wisata dapat berkembang dengan melibatkan masyarakat lokal serta dukungan dari pemerintah dan sektor swasta. Hasil penelitian ini menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan desa pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan dampak positif yang luas pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Studi ketujuh membahas program pariwisata desa sebagai strategi pembangunan berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi lokal. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pariwisata desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya yang ada di sekitarnya. Studi ini menekankan bahwa kesuksesan pariwisata desa bergantung pada dua faktor: daya tarik lokasi wisata dan sejauh mana masyarakat diberdayakan dan memiliki kendali atas pengelolaan lokasi wisata tersebut.

Di Gua Pindul, Bejiharjo, Gunungkidul, studi kedelapan ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa berkelanjutan berbasis pariwisata. Metode Analisis Fenomenologis Interpretatif (IPA) digunakan dalam studi ini untuk memahami bagaimana masyarakat lokal berpartisipasi dalam pengelolaan desa pariwisata dan bagaimana hal ini

mempengaruhi kesehatan mereka. Hasil studi menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Namun, tantangan seperti dominasi investor luar dan ancaman kerusakan lingkungan akibat *over-tourism* tetap menjadi masalah utama.

Studi kesembilan ini mengkaji pengembangan Desa Wisata Cisaat di Kabupaten Subang, Jawa Barat, sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi dalam studi kualitatif deskriptif ini. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pengembangan desa, dan peningkatan kualitas SDM masyarakat lokal. Meskipun program ini cukup berhasil, penelitian menemukan beberapa kendala seperti kondisi geografis yang rentan bencana, kapasitas SDM yang tidak merata, serta kurangnya kesadaran lingkungan dari sebagian masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam program desa wisata di Desa Cempaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menjadi objek penelitian kesepuluh. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut penelitian ini, program desa wisata Cempaka telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah dukungan dari pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, serta manajemen pemasaran yang efektif. Namun,

terdapat hambatan seperti kurangnya modal, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya keterampilan SDM.

Penelitian sebelumnya yang digunakan oleh para peneliti menunjukkan adanya keterkaitan dalam kajian pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata. Terdapat kesamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya, yaitu fokus pada upaya pemberdayaan masyarakat serta tujuan pemberdayaan yang mempertimbangkan tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat. Penelitian-penelitian terdahulu juga memberikan kontribusi dalam bentuk referensi teori yang menjadi landasan bagi penelitian ini.

Namun demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan mempertimbangkan potensi lokal yang bersifat kreatif di Desa Kalongan, seperti keberadaan komunitas film yang belum banyak dikaji dalam konteks pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Keberadaan komunitas kreatif ini tidak hanya berpotensi sebagai daya tarik wisata, tetapi juga dapat menjadi media pemberdayaan masyarakat yang berbasis kreativitas dan inovasi lokal.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata Kalongan bertujuan untuk memanfaatkan potensi wisata alam dan potensi lokal yang dimiliki agar dapat menarik wisatawan, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, menjadi alternatif sumber pendapatan, serta menjadikan Desa Wisata Kalongan sebagai destinasi wisata unggulan

di Kabupaten Semarang, khususnya di Kecamatan Ungaran Timur, serta menciptakan lingkungan desa yang nyaman dan aman bagi wisatawan.

1.5.2 Kajian Teori

1.5.2.1 Administrasi Publik

Istilah “administrasi” berasal dari kata “*ad*” dan “*minster*,” yang berarti ‘melayani’ atau “mengabdikan.” Dengan demikian, administrasi dapat dimaknai sebagai suatu proses pelayanan. Manusia dipandang sebagai unsur utama dalam administrasi karena keberadaan administrasi itu sendiri bersumber dari aktivitas manusia (Dimock and Dimock dalam Djani, W., 2022). Administrasi publik adalah perpaduan antara teori dan praktik yang bertujuan untuk membangun pemahaman yang luas tentang fungsi pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat. Hal ini didefinisikan sebagai proses kolaboratif yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk melaksanakan fungsi pemerintah secara optimal, efektif, dan efisien (Rodiyah, 2021), sehingga kebijakan publik yang dihasilkan dapat lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan warga (Henry dalam Djani, W., 2022).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik tidak hanya sekedar aktivitas teknis pemerintahan, melainkan juga mencakup aspek pelayanan, kolaborasi, teori dan praktik, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Intinya, administrasi publik adalah jembatan antara fungsi negara dan kesejahteraan rakyat.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma merupakan suatu kerangka pemikiran yang digunakan oleh para ahli untuk mengkaji dan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Paradigma ini bertujuan untuk menganalisis berbagai peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat .

Adapun paradigma administrasi yang dikemukakan oleh N. Henry (Rodiyah et al., 2021) adalah sebagai berikut:

1. Paradigma I (1900-1926), yang juga dikenal sebagai Paradigma *Dichotomi* antara Politik dan Administrasi, menekankan bahwa politik memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat, sementara administrasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Pemisahan fungsi antara politik dan administrasi ini melahirkan struktur pemerintahan yang terbagi atas tiga cabang kekuasaan, yakni legislatif sebagai representasi kehendak rakyat dalam penyusunan kebijakan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan, serta yudikatif yang berperan mendukung dan menjaga legalitas dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Paradigma II (1927-1937), yang juga dikenal sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi, dikembangkan oleh Willoughby, Gulick, dan Urwick. Metode ini berfokus pada

prinsip-prinsip dasar manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengadaan tenaga kerja, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran (disingkat POSDCORB). Paradigma ini menekankan pentingnya efisiensi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan administrasi publik, yang secara fundamental membedakannya dari praktik manajemen di sektor swasta. Fokus utamanya terletak pada penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam konteks organisasi publik.

3. Paradigma III (1950-1970), atau Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, hadir sebagai respons kritis terhadap paradigma sebelumnya. Tokoh utama dalam fase ini, Herbert Simon, mengajukan kritik tajam terhadap pendekatan normatif dalam prinsip-prinsip administrasi yang dianggapnya tidak bersifat universal. Fokus utama dari paradigma ini terletak pada studi birokrasi dalam konteks pemerintahan, meskipun pendekatannya masih bersifat abstrak dan memiliki sejumlah keterbatasan konseptual.
4. Paradigma IV (1956-1970), atau Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi, menitikberatkan kajiannya pada perilaku individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Fokus utamanya mencakup analisis manajerial, penerapan teknologi modern, serta metode akademik seperti metode kuantitatif,

analisis sistem, dan riset operasi. Paradigma ini telah berkembang menjadi dua cabang utama ilmu administrasi murni. Yang pertama adalah ilmu administrasi murni yang mempelajari psikologi sosial, dan yang kedua adalah ilmu administrasi murni yang berfokus pada kebijakan publik.

5. Paradigma V (1970-sekarang) juga dikenal sebagai Paradigma Administrasi Negara. Paradigma ini menunjukkan kejelasan baik dalam aspek lokus maupun fokus kajiannya. Secara substantif, Paradigma V menitikberatkan perhatiannya pada isu-isu serta kepentingan publik. Sementara itu, fokus teoritis dari paradigma ini berkaitan erat dengan pengembangan teori dalam bidang organisasi, manajemen, serta kebijakan publik.
6. Paradigma VI (1990-sekarang), yang juga dikenal sebagai paradigma *governance*, merepresentasikan fase terbaru dalam evolusi ilmu administrasi publik. Paradigma ini lahir sebagai hasil sintesis dari paradigma-paradigma sebelumnya, yang saling melengkapi dan memperkaya pendekatan dalam memahami dinamika administrasi publik. Pergeseran konsep dari *government* ke *governance* menandai perubahan orientasi dari pendekatan yang bersifat sentralistik menuju model kolaboratif yang menekankan sinergi di antara tiga pihak utama: negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Paradigma ini berfokus pada pembentukan tata kelola yang partisipatif,

transparan, dan akuntabel. Istilah “tata kelola yang baik” sering digunakan untuk menggambarkan hal ini.

1.5.2.3 Manajemen Publik

Salah satu definisi dari manajemen adalah strategi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengaturan, pengarahan, dan pemberdayaan individu untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas mereka secara optimal. Manajemen publik merupakan bidang kajian interdisipliner yang mencakup berbagai aspek organisasi secara menyeluruh. Studi ini menggabungkan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, sumber daya fisik, informasi, dan dinamika politik.

Firdausijah et al. (2023) mendefinisikan manajemen publik sebagai upaya mengarahkan dan mengatur sektor publik agar mampu bekerja secara kolaboratif dalam mencapai tujuan bersama, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat. Manajemen publik berperan penting dalam mengkoordinasikan sumber daya dan perilaku individu dalam organisasi publik untuk mewujudkan visi institusi secara efektif. Seiring dengan perkembangan zaman, manajemen publik dituntut untuk adaptif dan mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi manajerial secara optimal guna mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan komentar para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen publik adalah suatu disiplin ilmu dan profesi yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam administrasi publik, yang

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian, dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi publik secara efektif, efisien, dan profesional.

1.5.2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah proses memberikan dukungan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka agar dapat hidup secara mandiri. Ini melibatkan upaya mendorong serta memotivasi mereka agar mampu membuat keputusan dalam menentukan arah hidup mereka sendiri (Priyono, S. Onny dan Pranarka dalam Pratidina Santoso, 2022). Menurut Adimihardja dalam Suksmawati (2022) mengungkapkan tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan potensi ekonomi komunitas yang kurang beruntung sambil menjaga nilai-nilai budaya lokal dan meningkatkan martabat, harga diri, dan rasa percaya diri mereka. Pemberdayaan, menurut Suharto dalam Pratidina Santoso (2022), adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang, terutama mereka yang berada dalam posisi lemah atau rentan, sehingga mereka dapat lebih baik dalam:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar yang memungkinkan mereka untuk bebas berpendapat, serta terhindar dari kelaparan, ketidaktahuan, dan penyakit.
- b) Tersedianya fasilitas yang memadai dan mudah diakses yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mempermudah

akses ke sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa.

- c) Berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan guna memperluas wawasan dan berpikir lebih terbuka, sehingga dapat mengambil keputusan secara bijaksana.

Menurut Slamet dalam Pratidina Santoso (2022), pemberdayaan masyarakat adalah transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui proses pembelajaran partisipatif. Untuk menciptakan kehidupan yang lebih berdaya, mandiri, dan berpartisipasi, semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan (individu, kelompok, dan lembaga) harus diubah melalui pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, Winarni dalam Suksmawati (2022) menyatakan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga komponen utama: pengembangan (pemberdayaan), penguatan potensi atau kapasitas (pemberdayaan), dan pencapaian kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan berlaku untuk kelompok yang memiliki potensi terbatas dan masih dapat dikembangkan untuk mencapai tingkat kemandirian yang diperlukan. Menurut Wrihatnolo dalam Pratidina Santoso (2022), pembangunan yang didorong oleh masyarakat, atau pembangunan yang diprakarsai dan diarahkan oleh masyarakat, dapat didefinisikan sebagai pembangunan yang dimulai dan diarahkan oleh masyarakat, menurut konsep pemberdayaan masyarakat.

Menurut pemahaman ini, pemberdayaan masyarakat terdiri dari dua jenis pembangunan: pembangunan masyarakat dan pembangunan berbasis masyarakat. Selain itu, terdapat pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat, yang dapat didefinisikan sebagai pembangunan yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.

1.5.2.5 Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses di mana masyarakat memperoleh kendali atas kehidupan dan lingkungan mereka, memungkinkan mereka untuk bertindak atas isu-isu yang dianggap penting. Dalam Pratidina Santoso (2022), Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu "proses menjadi" daripada sekadar "proses instansi". Menurut teori Wrihatnolo, ada tiga tahap pemberdayaan masyarakat yang harus diperhatikan. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyadaran

Tujuannya adalah mendorong orang-orang untuk berjuang keluar dari kemiskinan dan memahami hak-hak mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Kelompok sasaran yang akan diberdayakan akan menerima "pencerahan," yang berarti mereka akan belajar tentang hak-hak mereka. Proses ini biasanya dilakukan melalui instruksi. Misalnya, masyarakat miskin dididik bahwa mereka memiliki hak untuk menjadi komunitas yang lebih sejahtera jika mereka dapat mengatasi kemiskinan mereka.

2. Tahap Pengkapasitasan

Memberikan keterampilan kepada komunitas yang kurang beruntung agar dapat memanfaatkan peluang melalui pelatihan dan kegiatan yang meningkatkan keterampilan hidup. Proses ini umumnya dikenal sebagai *capacity building*, atau secara sederhana disebut sebagai *enabling*.

3. Tahap Pendayaan

Komunitas diberi kesempatan yang sesuai dengan kemampuan mereka melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan, yang memungkinkan mereka untuk memainkan peran yang lebih signifikan sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, aspirasi komunitas diakomodasi dan mereka dibimbing untuk memikirkan diri mereka sendiri tentang akibat dari keputusan yang telah mereka buat sebelumnya.

1.5.2.6 Faktor-Faktor yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat

Ada banyak komponen penting yang mempengaruhi seberapa efektif pemberdayaan masyarakat dalam proses tersebut. Sumaryadi (2005:154-158) mencatat delapan komponen utama yang mempengaruhi dinamika pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Situasi dan kondisi yang mempengaruhi penerimaan pemberdayaan masyarakat.
- b. Persepsi masyarakat bahwa kekuasaan untuk menerapkan pemberdayaan hanya diberikan kepada individu tertentu.

- c. Budaya ketergantungan yang telah melekat dalam masyarakat menyebabkan pola pikir dan tindakan yang terstruktur.
- d. Para pemimpin yang egois dan tidak memberikan otoritas penuh terhadap masyarakat mereka sendiri.
- e. Pemberdayaan memiliki batas selama proses, dengan motivasi dan kemampuan setiap orang berbeda.
- f. Keyakinan para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah cara mereka melihat anggota komunitas mereka.
- g. Pemberdayaan menghalangi perubahan yang cepat.
- h. Pentingnya dukungan sumber daya (sumber daya) yang signifikan dari segi dana dan waktu.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat ditentukan dari seberapa besar faktor yang mempengaruhi proses keberlangsungannya. Mardikanto dalam Sanmutiane (2024) mengungkapkan terdapat beberapa faktor pendorong dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam dapat mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang membuatnya strategis untuk pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan yang bijak terhadap sumber daya alam tidak hanya menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti

pangan, air bersih, dan energi. Ketika masyarakat lokal memiliki akses dan kontrol atas sumber daya alam di sekitarnya, mereka mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara lebih bermakna dan kontekstual.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen vital dalam pemberdayaan masyarakat. Kreativitas, kemampuan belajar, dan daya adaptasi individu memungkinkan terjadinya inovasi sekaligus memberikan respons terhadap dinamika perubahan lingkungan. Keterlibatan aktif individu dalam pengambilan keputusan dan peran sosialnya akan memperkuat partisipasi yang inklusif. Proses pemberdayaan mencakup peningkatan kesejahteraan, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan hak dasar lainnya yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

c. Keadaan Kelembagaan

Lembaga, baik yang bersifat pemerintahan maupun non-pemerintahan (nirlaba), memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan, mengelola sumber daya, dan mendistribusikan dukungan berupa dana, layanan pendidikan, dan infrastruktur. Lembaga pelatihan turut berkontribusi dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat, sementara lembaga demokrasi membuka ruang partisipasi publik

dalam pengambilan kebijakan. Akses terhadap lembaga keuangan juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha. Untuk menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan dalam pemberdayaan, sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangat penting.

d. Sarana dan Prasarana

Infrastruktur dan fasilitas merupakan pilar utama pemberdayaan masyarakat. Ketika infrastruktur seperti jalan, transportasi, sekolah, rumah sakit, dan pusat ekonomi tersedia, hal ini meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Infrastruktur teknologi dan informasi, bersama dengan fasilitas olahraga dan keamanan, menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi pribadi. Dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah ke berbagai sumber daya dan layanan. Ini meningkatkan pemberdayaan umum.

e. Kebijakan

Kebijakan berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur dan mengarahkan proses pemberdayaan masyarakat. Kebijakan yang inklusif dan progresif akan menciptakan peluang yang merata, menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, mendorong kesetaraan sosial, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian,

kebijakan bukan hanya bersifat teknokratik, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial.

f. Organisasi dan Administrasi

Organisasi dan administrasi menyediakan struktur dan mekanisme kerja yang memungkinkan efektivitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Organisasi yang dikelola secara baik mampu mengatur sumber daya secara efisien, sementara administrasi yang akuntabel memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, peningkatan budaya organisasi yang mendukung pemberdayaan, dan peningkatan komunikasi akan menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan dan keadilan sosial.

Menurut Handayani, A. V. (2023), terdapat tiga faktor utama yang menjadi hambatan dalam proses pemberdayaan masyarakat di desa wisata, yaitu:

- a. Kendala berasal dari kelembagaan atau organisasi pengelola desa wisata, terutama terkait dengan konflik internal antar anggota pengelola dan pemangku kepentingan, serta tumpang tindih jabatan yang mengganggu proses pengambilan keputusan dan koordinasi.
- b. Aspek sumber daya manusia menyebabkan kendala, terutama terkait dengan kapasitas, keterampilan, dan pengetahuan

masyarakat yang kurang dalam manajemen potensi wisata berkelanjutan.

- c. Keterbatasan modal usaha juga menjadi faktor penghambat signifikan, di mana pelaku usaha lokal sering mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan atau pendanaan yang memadai untuk mengembangkan kegiatan pariwisata.

1.5.2.7 Desa Wisata

Desa wisata adalah kawasan pedesaan yang menawarkan suasana yang mencerminkan keaslian lingkungan desa, seperti perencanaan ruang, arsitektur bangunan, pola sosial dan budaya masyarakat, dan adat istiadat. Selain itu, desa wisata harus mampu memenuhi kebutuhan dasar wisatawan, seperti akomodasi, makanan dan minuman, souvenir, dan atraksi wisata. Oleh karena itu, penting bagi pengembangan desa wisata untuk memiliki ketersediaan akomodasi, makanan dan minuman, souvenir, dan atraksi wisata (Murdiyanto, 2011; Prawira dkk., 2021 dalam Achmad dkk., 2023). Menurut Hardiwijoyo dalam Suksmawati (2022), pariwisata pedesaan dapat didefinisikan sebagai komunitas yang memiliki fasilitas lingkungan yang memungkinkan wisatawan menikmati, mengenali, dan mengalami keunikan desa dan semua atraksinya sambil memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

Desa wisata, menurut Suwantoro dalam Pratidina Santoso (2022), adalah kawasan pedesaan yang menawarkan suasana yang mencerminkan keaslian lingkungan desa, dengan pola sosial dan budaya masyarakat, adat istiadat, arsitektur bangunan, dan perencanaan ruang. Selain itu, desa wisata

harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pengunjung, seperti akomodasi, makanan dan minuman, suvenir, dan atraksi wisata. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata sangat penting untuk memiliki ketersediaan akomodasi, makanan dan minuman, suvenir, dan atraksi wisata.

Hardini et al. dalam Risfandini et al. (2023) mendeskripsikan desa wisata sebagai tempat dimana wisatawan terlibat dalam kegiatan rekreasi untuk membenamkan diri dalam lingkungan pedesaan, yang melibatkan proses pembelajaran untuk memahami budaya, nilai, dan tradisi lokal. Tujuan pariwisata adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan dan meningkatkan pendapatan mereka. Biasanya dikembangkan oleh pemerintah atau masyarakat lokal, desa wisata menawarkan pengalaman mendalam bagi pengunjung, memfasilitasi pembelajaran dan keterlibatan dengan budaya lokal.

Menurut Muliawan dalam Pratidina Santoso (2022), berikut adalah beberapa kriteria yang dimiliki oleh desa wisata:

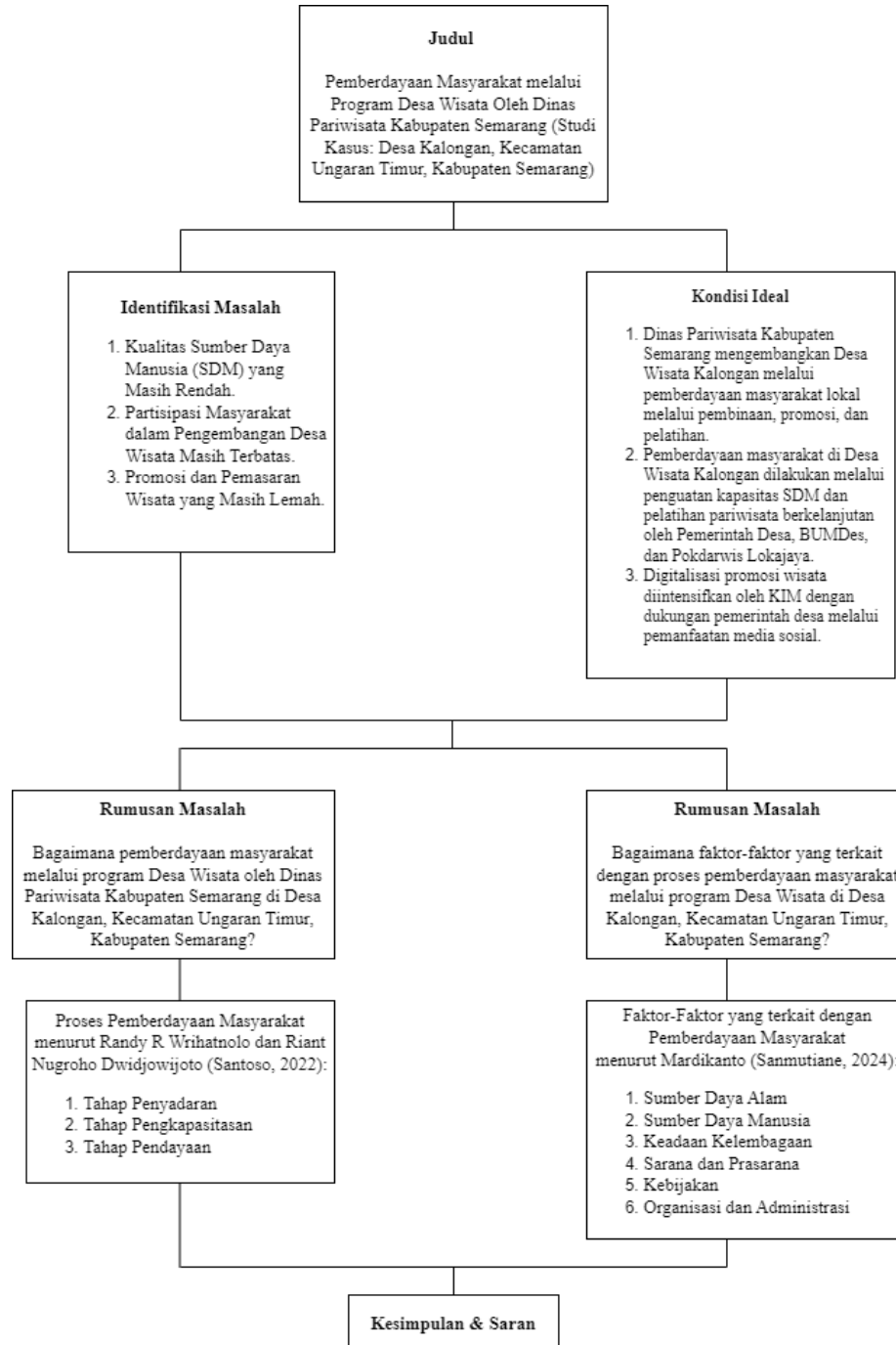
1. Memiliki potensi untuk memberikan daya tarik wisata unik dan unik dari karakteristik fisik lingkungan alam pedesaan serta kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.
2. Ada dukungan dan kesiapan fasilitas untuk mendukung kegiatan pariwisata pedesaan, seperti penginapan/akomodasi, ruang interaksi bagi wisatawan dan tamu, dan fasilitas pendukung lainnya.

3. Terdapat interaksi dengan konsumen, yaitu wisatawan, yang ditunjukkan oleh banyaknya wisatawan yang mengunjungi desa tersebut.
4. Ada dukungan, proyek, dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa yang berkaitan dengan pariwisata (sebagai desa wisata).

Dengan demikian, ada beberapa alasan mengapa Desa Kalongan dapat dianggap sebagai desa wisata. Air Terjun Gending Asmoro di Kalongan Timur Ungaran dan Air Terjun Tedjo Asmoro di Desa Dampu adalah beberapa contohnya, yang dibuka setiap Minggu Legi dan Pahing; keduanya dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai atraksi budaya.

1.6 KERANGKA BERPIKIR

Tabel 1. 2 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

1.7 FENOMENA PENELITIAN

Tabel 1. 3 Fenomena Penelitian

| Rumusan Masalah | Fenomena Penelitian | Sub Fenomena |
|---|----------------------------|--|
| Pemberdayaan Masyarakat melalui program Desa Wisata di Desa Kalongan | Tahap Penyadaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi tentang pengembangan desa wisata kepada masyarakat. 2. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari pembentukan desa wisata. |
| | Tahap Pengkapasitasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam mengelola desa wisata. 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pelatihan pemberdayaan. |
| | Tahap Pendayaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kecakapan masyarakat dalam menjalankan aktivitas desa wisata. 2. Pelaksanaan evaluasi oleh masyarakat terhadap keberlangsungan dan perkembangan Desa Wisata Kalongan. |
| Faktor-faktor yang terkait dengan proses Pemberdayaan Masyarakat melalui program Desa Wisata di Desa Kalongan | Sumber Daya Alam | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya potensi sumber daya alam di Desa Wisata Kalongan yang dapat dioptimalkan. 2. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. |
| | Sumber Daya Manusia | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dampak nyata dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. 2. Munculnya inovasi dan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan potensi Desa Wisata Kalongan. |
| | Keadaan Kelembagaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat hubungan komunikasi yang baik antara lembaga pemerintah dengan pengelola desa wisata. 2. Adanya bantuan dan fasilitasi dari lembaga pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat. |
| | Sarana dan Prasarana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengelolaan Desa Wisata Kalongan. 2. Adanya upaya inovatif dalam pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di desa wisata. |
| | Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kebijakan yang mengatur pemberdayaan masyarakat secara spesifik. |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| | | 2. Terlihat adanya dampak positif dari implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. |
| | Organisasi dan Administrasi | 1. Terdapat struktur organisasi yang jelas dan teratur sebagai dasar pengelolaan sumber daya yang efektif. 2. Adanya distribusi sumber daya yang adil, komunikasi yang efektif, budaya organisasi yang mendukung, serta upaya pengembangan sumber daya manusia untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. |

1.8 OPERASIONALISASI KONSEP

1.8.1 Pemberdayaan Masyarakat

Program desa wisata Desa Kalongan adalah upaya terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa.

Pemberdayaan terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. Tahap Penyadaran

Pada saat ini, masyarakat memahami betapa pentingnya mendapatkan pemberdayaan jika mereka ingin meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri. Penyadaran ini diukur dengan cara:

- a. Pelaksanaan sosialisasi tentang pengembangan desa wisata kepada masyarakat.
- b. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari pembentukan desa wisata.

2. Tahap Pengkapasitasan

Pada tahap ini, sebelum komunitas sepenuhnya diberdayakan, perlu dilakukan pembangunan kapasitas. Pengkapasitasan mencakup

pengembangan keterampilan individu, penguatan organisasi, serta pembentukan sistem nilai yang mendukung. Indikator dari tahap ini antara lain:

- a. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam manajemen desa wisata.
- b. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam program pelatihan pemberdayaan.

3. Tahap Pendayaan

Tahap ini merupakan implementasi pemberdayaan, di mana masyarakat Desa Kalongan diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kualitas diri yang telah dimiliki, sekaligus dilibatkan aktif dalam pengelolaan desa wisata. Indikator keberhasilannya meliputi:

- a. Tingkat kecakapan masyarakat dalam menjalankan aktivitas desa wisata.
- b. Pelaksanaan evaluasi oleh masyarakat terhadap keberlangsungan dan perkembangan Desa Wisata Kalongan.

1.8.2 Faktor-Faktor yang terkait dengan Pemberdayaan

Jalannya pemberdayaan masyarakat menuju keberhasilan dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat. Pendorong adalah segala kondisi yang membantu kelancaran suatu upaya, sementara penghambat adalah kondisi yang berpotensi merintangi atau melemahkan upaya yang sedang dilakukan.

Dalam mengelola Desa Wisata Kalongan, terdapat beberapa hal yang dapat menghambat pemberdayaan masyarakat, beberapa di antaranya dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam

Faktor ini ditentukan oleh ketersediaan potensi sumber daya alam serta manajemen dalam pengembangannya.

- a. Tersedianya potensi sumber daya alam di Desa Wisata Kalongan yang dapat dioptimalkan.
- b. Keterlibatan masyarakat yang aktif dalam manajemen dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2. Sumber Daya Manusia

Ini terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan dan partisipasi mereka dalam manajemen desa wisata.

- a. Terdapat dampak nyata dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.
- b. Munculnya inovasi dan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan potensi Desa Wisata Kalongan.

3. Keadaan Kelembagaan

Faktor kelembagaan dilihat dari efektivitas lembaga dalam memberikan dukungan pemberdayaan kepada masyarakat.

- a. Terdapat hubungan komunikasi yang baik antara lembaga pemerintah dengan pengelola desa wisata.

- b. Adanya bantuan dan fasilitasi dari lembaga pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat.

4. Sarana dan Prasarana

Faktor ini berkaitan dengan ketersediaan fasilitas fisik yang menunjang pemberdayaan masyarakat.

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengelolaan Desa Wisata Kalongan.
- b. Adanya upaya inovatif dalam pengembangan dan peningkatan sarana prasarana di desa wisata.

5. Kebijakan

Faktor kebijakan dilihat dari dukungan regulasi pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan desa wisata.

- a. Terdapat kebijakan yang mengatur pemberdayaan masyarakat secara spesifik.
- b. Terlihat adanya dampak positif dari implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

6. Organisasi dan Administrasi

Faktor ini mencerminkan kesiapan struktur organisasi dan administrasi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata.

- a. Terdapat struktur organisasi yang jelas dan teratur sebagai dasar pengelolaan sumber daya yang efektif.

- b. Keadilan dan kesetaraan dicapai melalui komunikasi yang efektif, budaya organisasi yang mendukung, pembagian sumber daya yang adil, dan pengembangan sumber daya manusia.

1.9 METODE PENELITIAN

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dengan mempertimbangkan konteks dan pengalaman subjektif para peserta (Sugiyono dalam Hasan et al., 2025). Menurut Creswell (dalam Hasan et al., 2025), penelitian kualitatif berupaya mengungkap realitas yang bersifat subjektif dan kompleks, melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menggali makna, alasan, dan perspektif di balik suatu peristiwa.

Secara khusus, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menyajikan data dalam bentuk cerita atau deskripsi verbal daripada angka atau statistik. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai objek yang diteliti tanpa menarik generalisasi atau kesimpulan kuantitatif (Sugiyono dalam Roosinda, 2021). Oleh karena itu, dianggap bahwa metode ini paling cocok untuk menggambarkan realitas di lapangan secara menyeluruh dan kontekstual.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena pendekatan kuantitatif dianggap kurang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, menyeluruh, dan kaya makna. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan hasil dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi di lokasi penelitian.

1.9.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau entitas yang memiliki hubungan langsung dengan subjek penelitian sehingga mereka dapat memberikan informasi yang relevan untuk mendapatkan data utama penelitian (Sugiyono, 2014). Pada tahap awal penelitian, teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* digunakan untuk memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Tujuan teknik *purposive sampling* adalah untuk mendapatkan data dari orang-orang yang benar-benar memahami masalah yang dikaji. Namun, apabila dalam proses penelitian di lapangan dibutuhkan informasi tambahan yang lebih kompleks, maka digunakan teknik *snowball sampling*. Teknik ini memungkinkan informan awal untuk merekomendasikan informan lain yang memiliki karakteristik serupa atau relevan, sehingga jaringan informan berkembang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan data penelitian.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, adapun daftar informan yang dijadikan oleh penulis sebagai subjek penelitian ini, antara lain:

1. Individu yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata. Individu ini dipilih karena mereka adalah pihak yang merasakan dampak langsung dari pelaksanaan program pemberdayaan. Peneliti dapat mengumpulkan data empiris tentang sejauh mana program desa wisata dapat meningkatkan kemampuan, kesejahteraan, dan keterlibatan masyarakat setempat melalui pandangan dan pengalaman mereka.
2. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang adalah DISPPARTA. Informasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dipilih karena mereka memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata. Mereka dapat memberikan informasi mendalam terkait tujuan program, mekanisme pendampingan, serta dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan Desa Wisata Kalongan.
3. Pemerintah Desa Kalongan, yakni Kepala Desa atau Sekretaris Desa kalongan. Kepala Desa atau Sekretaris Desa Kalongan dipilih karena berperan sebagai pengambil keputusan dan koordinator utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan di tingkat desa. Informasi dari Kepala Desa serta Sekretaris Desa penting untuk memahami kebijakan, strategi, serta dinamika koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak Dinas Pariwisata dalam pengembangan desa wisata.

4. Perwakilan dari Pokdarwis Desa Wisata Kalongan. Di tingkat lokal, Pokdarwis berfungsi sebagai pusat penggerak kegiatan pariwisata. Perwakilan dari Pokdarwis dipilih karena memiliki pemahaman langsung tentang aktivitas operasional, promosi, dan pengelolaan destinasi wisata di Desa Kalongan. Melalui mereka, peneliti dapat menggali informasi terkait peran kelembagaan lokal dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata.

Jumlah informan yang direncanakan dalam penelitian ini adalah para warga yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Desa Wisata, perwakilan dari Dinas Pariwisata (Disparta) Kabupaten Semarang, perwakilan dari Pemerintah Desa Wisata Kalongan, dan perwakilan dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa wisata Kalongan.

1.9.3 Lokus dan Fokus Penelitian

1.9.3.1 Lokus Penelitian

Lokus penelitian merujuk pada lokasi terjadinya permasalahan yang menjadi fokus kajian, serta tempat di mana peneliti memperoleh data dan informasi dari objek yang diteliti (Kismartini, 2023). Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Kalongan, Kabupaten Semarang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengembangan potensi desa wisata Kalongan masih menghadapi hambatan, khususnya terkait keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan intervensi strategis

melalui program pemberdayaan masyarakat desa guna mendorong optimalisasi potensi wisata yang dimiliki.

1.9.3.2 Fokus Penelitian

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa Fokus penelitian kualitatif ini adalah untuk memperbarui informasi yang dapat diperoleh dari situasi sosial di lapangan. Di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, upaya pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata menjadi subjek penelitian ini.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Data utama dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Untuk mendukung validitas deskriptifnya, laporan penelitian akan memuat banyak kutipan langsung dari narasumber untuk menunjukkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Transkrip hasil wawancara dan dokumentasi foto adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan klasifikasi sumber data menurut Sugiyono (2014), pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu:

- a. Sumber data primer, yang berarti sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada peneliti. Dalam kasus ini, informasi ini dikumpulkan langsung dari partisipan melalui proses wawancara yang menyeluruh.

- b. Sumber data sekunder: sumber data yang memberikan informasi secara tidak langsung untuk penelitian ini termasuk *e-book* dan referensi tertulis lain yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Bagi peneliti, sumber data sangat penting karena keakuratan dalam memilih dan mengidentifikasi sumber data berdampak pada kualitas informasi yang diperoleh. Untuk melengkapi data penelitian, penelitian ini menggunakan dua data, seperti data primer dan data sekunder serta dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Informasi yang langsung dikumpulkan dari sumbernya disebut sumber data primer. Metode pengumpulan seperti ini biasanya termasuk wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pada tahapan ini peneliti tertarik pada menggunakan data primer yang didapat melalui wawancara kepada kepala atau anggota Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Wisata Kalongan, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Kalongan, dan warga yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat.
2. Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung disebut sebagai sumber data sekunder, seperti dengan melihat penelitian yang dipublikasikan sebelumnya atau melalui penggunaan perantara pihak ketiga. Data sekunder dikumpulkan dengan studi yang sedang berlangsung, seperti buku, jurnal, makalah, dan situs web di internet. Data sekunder penelitian ini berasal dari studi yang diterbitkan

sebelumnya, jurnal, makalah, buku, artikel, berita online, undang-undang dan peraturan, profil, dan dokumen di Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan masalah penelitian.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018), tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pada tahap ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi langsung di lapangan, dan wawancara mendalam dengan sumber data.

1. Observasi

Penelitian ini menggunakan metode observasi untuk mengumpulkan data dan informasi yang mendalam tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

2. Wawancara

Interaksi antara individu yang memberikan pertanyaan dan orang yang menjawab yang kemudian disebut sebagai informan atau sumber apa yang disebut pasolong sebagai wawancara. Ada dua jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini: wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Wawancara langsung dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk memperoleh klarifikasi dan informasi yang lebih mendalam mengenai program pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Kantor Pariwisata

Kabupaten Semarang melakukan wawancara di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada dasarnya merupakan mengumpulkan data atau informasi yang dilakukan melalui dokumen peristiwa yang dicatat, digambarkan, atau didokumentasikan dianggap sebagai dokumen. Menelaah dokumen memungkinkan peneliti untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan data yang ditemukan di sana. Data dokumentasi berupa artikel, laporan kajian yang relevan, dan arsip yang berhubungan dengan pokok bahasan diteliti sebagai bahan acuan. Di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, peneliti mencatat data, dokumen, arsip, dan peraturan tentang program desa wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Metode pengambilan data dokumentasi digunakan.

1.9.6 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara konsisten, baik selama proses pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data, dalam interval waktu yang telah ditentukan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mengajukan pertanyaan lanjutan apabila jawaban dari informan dirasa belum memadai, hingga data yang diperoleh mencapai tingkat kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2018). Pengolahan data kualitatif dilakukan

melalui beberapa tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, dalam Fadjarajani dkk (2020), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Tahap penting dalam penelitian adalah proses pengumpulan data, yang memungkinkan analisis yang lebih baik. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga mengelompokkan, menyeleksi, serta menyusun data secara sistematis. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh dapat diolah secara efektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat diverifikasi.

2. Kondensasi Data

Analisis kualitatif mencakup tahap kondensasi data, yang mencakup tindakan seperti memilih, menyederhanakan, mengumpulkan, dan mengubah data yang berasal dari berbagai materi empiris, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya.

3. Penyajian Data

Proses mengintegrasikan dan mengorganisasikan informasi secara sistematis untuk memudahkan pengambilan keputusan dan pengambilan tindakan dikenal sebagai penyajian data. Melalui penyajian data, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Mereka juga dapat menggunakan data ini sebagai dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut dan mengambil tindakan berdasarkan hasilnya. Tahapan ini

mencakup penyusunan ulang data hasil wawancara ke dalam bentuk yang terstruktur sehingga mudah dipahami serta dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam proses penarikan kesimpulan penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Masalah yang muncul pada awal penelitian kualitatif hanya bersifat sementara. Penelitian kualitatif menemukan hal-hal baru. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal, hipotesis, deskripsi naratif, atau teori. Peneliti menggunakan pendekatan analisis data Miles dan Huberman dalam penelitian ini karena fase-fasenya mudah dipahami dan memungkinkan peneliti menyediakan data yang telah terstruktur dalam bentuk cerita atau pernyataan kalimat.

1.9.7 Kualitas dan Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas data ditentukan oleh sejauh mana data yang diperoleh mencerminkan fakta objektif di lapangan. Dengan kata lain, data dianggap valid jika ada kesesuaian antara kondisi nyata objek yang diteliti dan laporan peneliti. Menurut Sugiyono (2018), kebenaran penelitian kualitatif dapat relatif atau kontekstual, tergantung pada perspektif dan situasi yang dihadapi. Peneliti menggunakan triangulasi, yaitu proses pemeriksaan data melalui berbagai sumber, metode, dan waktu untuk memastikan kredibilitas data. Jenis triangulasi yang digunakan termasuk:

1. Triangulasi Sumber, yaitu upaya memverifikasi keabsahan informasi dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber berbeda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti

untuk melihat konsistensi informasi dari berbagai pihak yang terlibat.

2. Triangulasi Teknik, yakni pengujian data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Sebagai contoh, hasil wawancara dapat dibandingkan dengan temuan dari observasi lapangan atau dokumen tertulis sebagai bentuk validasi silang.

Dengan menerapkan triangulasi teknik dan sumber secara terpadu, kualitas data penelitian ini diperkuat. Penelitian ini berfokus pada proses pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, sehingga dipilih untuk menggunakan kedua jenis triangulasi ini. Oleh karena itu, untuk memastikan keabsahan dan validitas hasil penelitian, data harus diverifikasi dari berbagai sumber dan metode.